

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi menjadi permasalahan mendasar yang sering dihadapi setiap negara dalam kebijakan untuk pembangunan ekonomi, selain memiliki target mengejar pertumbuhan ekonomi yaitu untuk aspek pemerataan hasil dari pembangunan ekonomi. Pada sebagian negara pertumbuhan ekonomi yang selalu dijadikan indikator kemajuan ekonomi ini justru malah menyisakan beberapa persoalan. Pada dasarnya sebenarnya masih ada banyak persoalan dan perdebatan di setiap para ahli dalam untuk mengukur aktivitas perekonomian yang bias memberi dampak langsung dan juga bisa menggambarkan aktivitas perekonomian secara riil.

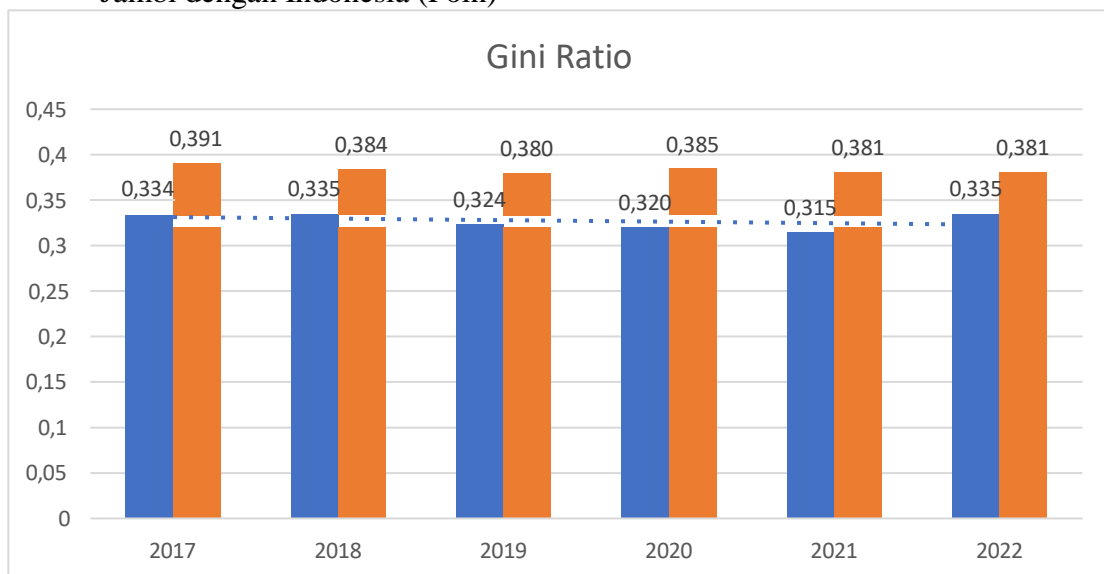
Di negara yang sedang berkembang indikator tersebut terkadang malah menjadikan sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau bakal terjadinya ketimpangan pendapatan. Menurut Sukirno (2018), istilah pembangunan (*development*) sering dihubungkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Beberapa ahli ekonomi juga menjelaskan pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan didalam struktur dan kegiatan ekonomi, sebab ekonomi tidak selalu tertarik dengan masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga dengan modernisasi kegiatan ekonomi.

Pembangunan yang sudah berlangsung secara menyeluruh di Provinsi Jambi tentunya sudah menaikkan perekonomian masyarakat. Capaian dan juga hasil-hasil pembangunan yang juga dirasakan oleh masyarakat adalah sebuah agregat pembangunan dari 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi yang juga tidak terlepas dari usaha dan kerja keras secara bersama antara masyarakat dan pemerintah. Potensi dan kekayaan alam daerah ini bisa dilihat sebagai keunggulan yang komparatif bagi daerah, akan tetapi disisi lain banyak kendala yang masih dialami seperti sumber daya manusia dan juga modal untuk memanfaatkan potensi tersebut yang dihadapi oleh

penentu kebijakan entahdari tingkat provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Menurut Amri, (2007) Akibat dari kondisi perekonomian yang belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama, masih ditemukannya kekurangan yaitu adanya kesenjangan antar wilayah khususnya di kabupaten/kota dalam mencapai tingkat perekonomian.

Alat ukur untuk melihat distribusi ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat adalah dengan melihat dari indeks gini (gini ratio). Dalam indeks gini yaitu memiliki kisaran 0-1. Ketika indeks gini mendekati 0 berarti menandakan ketimpangan semakin rendah (merata), akan tetapi apabila mendekati angka 1 berarti menandakan jika ketimpangan antar masyarakat tinggi dan semakin melebar (Sjafrizal, 2017). Berikut perbandingan tingkat distribusi ketimpangan pendapatan Provinsi Jambi dengan Indonesia yang diukur melalui gini ratio pada grafik 1.1:

1.1 Grafik Ketimpangan Distribusi Pendapatan Berdasarkan Gini Ratio Provinsi Jambi dengan Indonesia (Poin)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Keterangan: Biru Provinsi Jambi

Orange: Indonesia

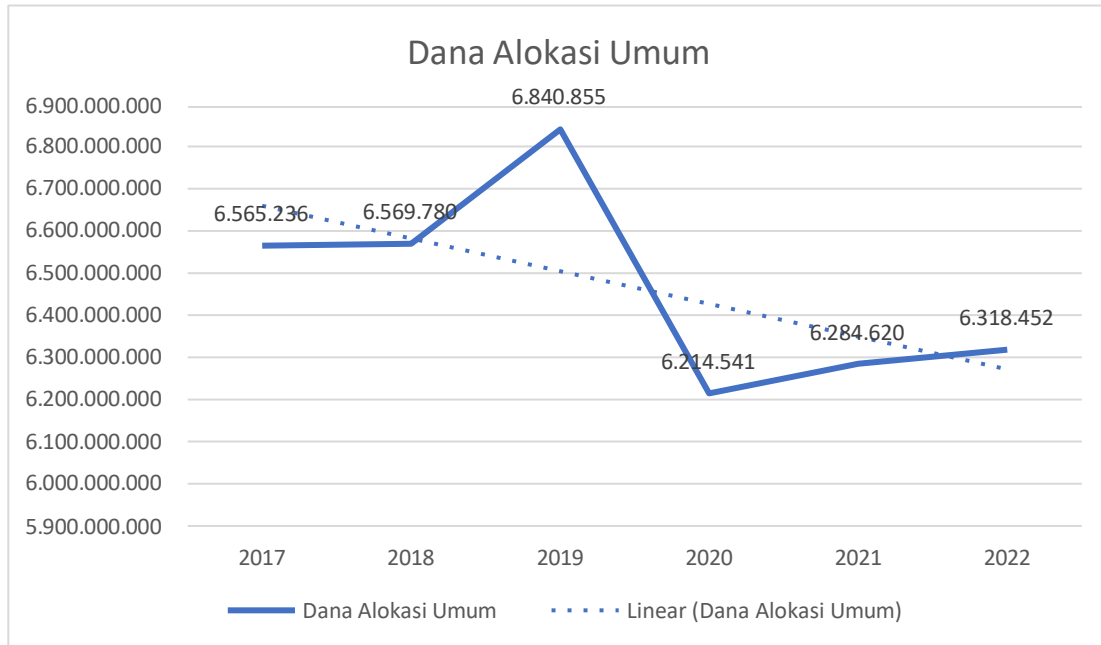
Berdasarkan grafik 1.1. menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur melalui gini ratio di Provinsi Jambi berfluktuasi akan tetapi cenderung

meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,335, indeks gini ratio tertinggi pada tahun 2018 dan 2022 yaitu sebesar 0,335 dan terendah pada tahun 2021 sebesar 0,315. Sedangkan indeks gini ratio Indonesia berfluktuasi tetapi cenderung menurun pada tahun 2022 sebesar 0,381, indeks gini ratio tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,391 dan terendah pada tahun 2019 sebesar 0,380.

Disparitas dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan demografis, akses mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, perbedaan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan jumlah angkatan kerja, alokasi dana pembangunan antar wilayah, serta ketertarikan investasi pada suatu wilayah (Todaro. Smith, 2019). Karena faktor tersebut maka pertumbuhan output setiap daerah berbeda dan pada akhirnya menyebabkan disparitas. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disparitas pendapatan yang akan peneliti bahas adalah dana alokasi umum, investasi dan jumlah penduduk miskin.

Dana alokasi umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjembatani kesenjangan anggaran dan menyeimbangkan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah untuk mendukung kemandirian kinerja pemerintah daerah. Pemberian dana alokasi umum oleh pemerintah ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah (Widjaja, 2017). Dana alokasi umum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan asumsi bahwa dana alokasi umum lebih digunakan untuk belanja pembangunan daripada belanja rutin. Alokasi dana alokasi umum untuk belanja pembangunan memungkinkan suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan (Sjafrizal, 2017). Selain belanja pembangunan, belanja modal juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Berikut adalah dana alokasi umum Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2022 pada grafik 1.2:

## 1.2 Penerimaan Dana Alokasi Umum Provinsi Jambi (Rupiah)



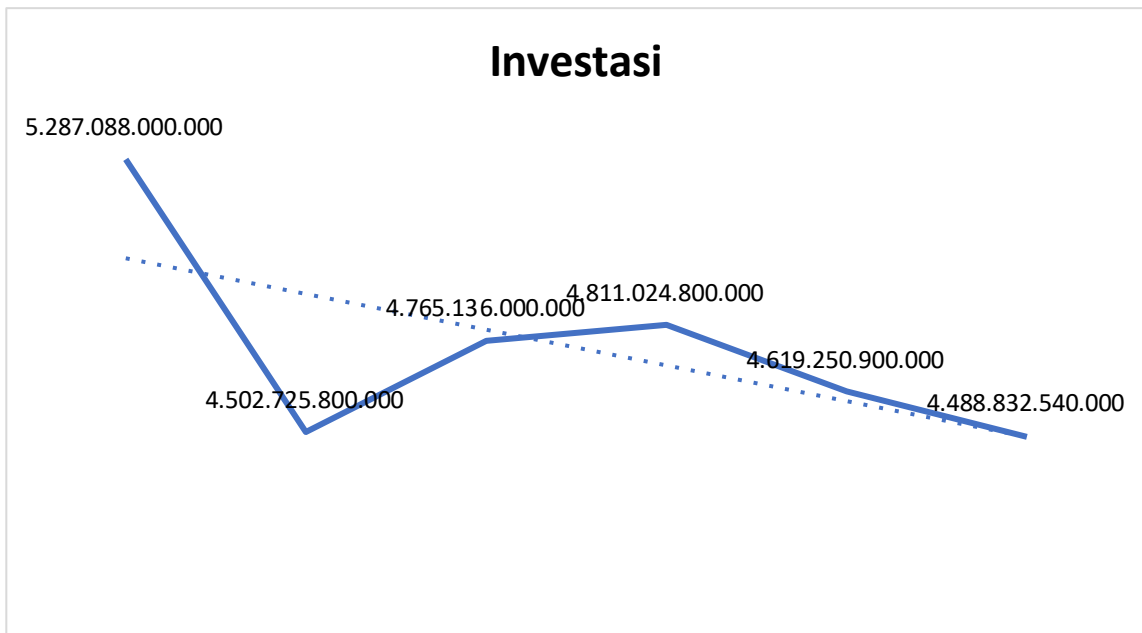
Sumber: Statistik dan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan grafik 1.2 menunjukkan bahwa dana alokasi umum di Provinsi Jambi berfluktuasi akan tetapi cenderung meningkat hal ini dapat dilihat dana alokasi umum tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.6.840.855.000 dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.6.214.541.000 Proporsi dana alokasi umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan adanya dana alokasi umum yang terlalu besarkan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akhirnya akan menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat(Widjaja, 2017). Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi penyebaran dana alokasi umum tiap daerah dari nilai rata-rata seluruh daerah semakin tinggi pula kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang di lakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Menurut (Sukirno, 2018) Investasi swasta memiliki peran penting dalam pola pembangunan daerah dalam mengembangkan sektor-sektor yang ada di suatu daerah. Investasi merupakan salah satu unsur penting

dalam perekonomian suatu daerah karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan ekonomi pada masasekarang maupun masa yang akan datang. Meningkatnya kegiatan investasi atau penanaman modal di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya kegiatan investasi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pada akhirnya mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan (Sjafrizal, 2017). Berikut adalah investasi Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2022 pada grafik 1.3:

### 1.3 Nilai Investasi Total PMA dan PMDN Provinsi Jambi (Rupiah)



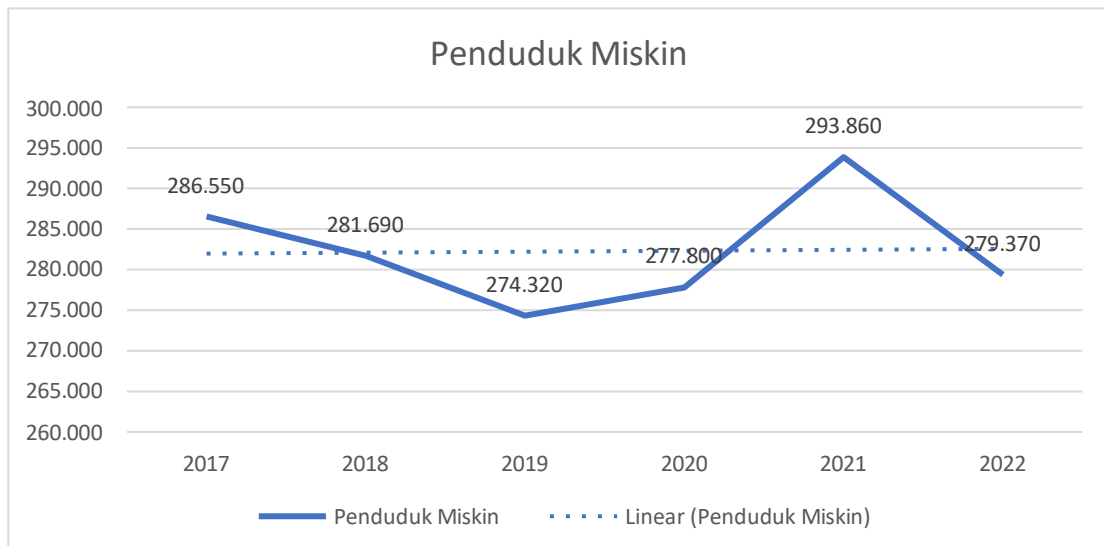
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan grafik 1.3 menunjukkan bahwa nilai investasi di Provinsi Jambi berfluktuasi akan tetapi cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari nilai investasi tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp.5.287.088.000.000 dan terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 4.488.832.540.000 Perkembangan nilai investasi di Provinsi Jambi yang cenderung menurun tentunya dipengaruhi berbagai faktor, baik kondisi lokasi, sumber daya alam maupun sumber daya manusia di wilayah tersebut. Investasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan

meningkatkan investasi pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, walaupun sumberdaya yang dimiliki cukup strategis dan memiliki jumlah yang melimpah (Jhingan, 2016). Namun persebaran investasi yang tidak merata di Provinsi Jambi ini tentunya akan berdampak pada kesenjangan pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan di Provinsi Jambi.

Kemiskinan menjadi permasalahan dalam ketimpangan pendapatan yang mengandung dua aspek, aspek pertama adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada dibawah garis kemiskinan, sedang aspek kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga. Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara keberhasilan memperbaiki distribusi pendapatan secara menyeluruh adalah jika laju pertumbuhan pendapatan golongan miskin lebih besar dari laju pertumbuhan pendapatan golongan kaya (Kuncoro, 2018). Berikut adalah kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2022 pada grafik 1.4:

#### 1.4 Penduduk Miskin Provinsi Jambi (Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

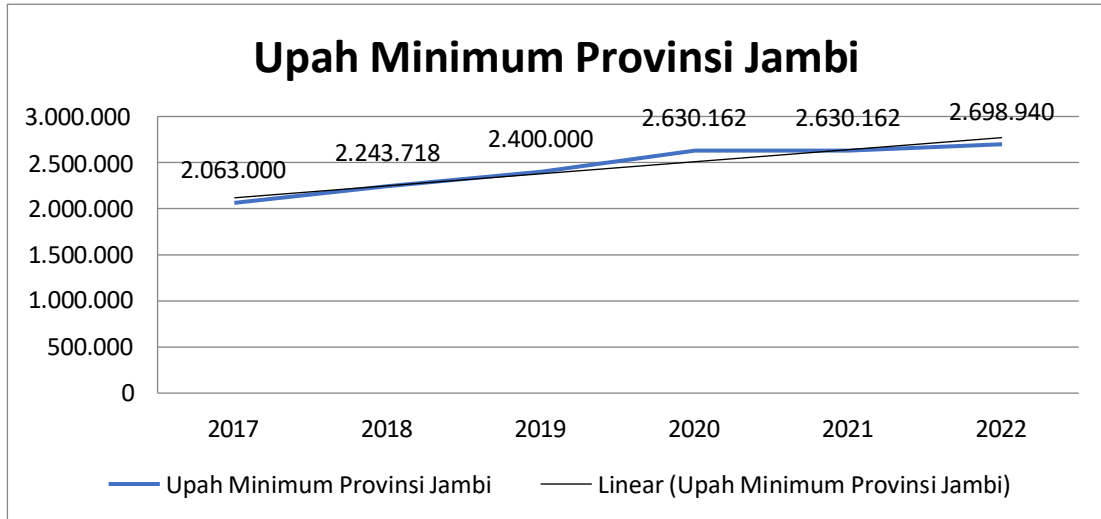
Berdasarkan grafik 1.4 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Jambi berfluktuasi penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 293.860 jiwa dan yang terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 274.320 jiwa. Di Provinsi Jambi menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang semakin menurun selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Tingginya tingkat ketimpangan di Provinsi Jambi masih menjadi masalah yang harus diatasi. Pertambahan penduduk cenderung berdampak terhadap penduduk miskin terutama bagi mereka yang tergolong sangat miskin. Sebagaimana besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan akan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan sehingga salah satu penyebab kemiskinan adalah ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya (Kuncoro, 2018).

Upah minimum telah di yakini sebagai alat yang efektif untuk menekan kesenjangan pendapatan. Sebagai sebuah kebijakan lembaga, upah minimum tidak hanya menjadi batas minimum upah secara umum, tetapi juga mempengaruhi kenaikan pendapatan dan memiliki dampak penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Upah minimum merupakan kebijakan yang bermanfaat untuk memastikan pekerja mendapatkan upah yang wajar sekaligus mencegah kemiskinan dikalangan pekerja yang mencakup pemenuhan standart kebutuhan hidup buruh. Lebih jauh, pendistribusian kembali penghasilan pekerja pada skala gaji terendah menurunkan dispersi upah dan kemungkinan akan meningkatkan permintaan agregat melalui efek multiplier.

Di banyak daerah upah minimum adalah hal utama dalam penetapan upah nasional. Mereka tidak hanya menyediakan batasan upah secara umum, tetapi juga mempengaruhi upah, menaikkan tingkat pendapatan dan memiliki dampak penting pada dispersi upah keseluruhan. Mereka yang bekerja di sektor formal adalah target kebijakan upah minimum. Mereka tidak menerima upah di bawah upah minimum karena peraturan tersebut. Ini menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan jika tidak akan dikenakan denda. Oleh karena itu, upah minimum

tidak hanya alat untuk melindungi pekerja di bagian bawah skala upah tetapi sering menjadi "isu-kelas menengah" (Levin-Waldman dan Whalen, 2017). Berikut adalah investasi Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2022 pada grafik 1.3:

#### 1.4 Nilai Upah Minimum Provinsi Jambi (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan grafik 1.4 menunjukkan bahwa nilai upah minimum di Provinsi Jambi meningkat, hal ini dapat dilihat dari nilai investasi tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.063.000 dan terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2.698.940. Pada saat yang sama, upah minimum harus digunakan dengan hati-hati sebagai instrumen antikemiskinan karena dampaknya tergantung pada distribusi lapangan kerja ditingkat rumah tangga. Akibatnya, mereka tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat upah pada target grup tertentu. Keseimbangan harus dipastikan ketika menetapkan upah minimum. Jika ditetapkan terlalu rendah, mungkin kehilangan targetnya. Ketika itu terlalu tinggi dari nilai upah rata-rata, mungkin mencegah perusahaan mempekerjakan pekerja berketerampilan rendah atau mendorong mempekerjakan mereka secara informal (ILO, 2021).

Berbagai penelitian yang sejalan dilakukan Yolanda (2021) yang menunjukkan bahwa penduduk miskin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan. Penelitian yang dilakukan Primandani (2020) yang menunjukkan bahwa



investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan. Penelitian yang dilakukan Valentiana (2015) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan.

Dari uraian tersebut ketimpangan pendapatan disebabkan karena terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat pendapatan riil dari yang kaya terus tumbuh lebih cepat sedangkan yang miskin terus berkurang (Todaro, Smith 2019). Ketimpangan pendapatan dalam praktik sering menimbulkan kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, sumber daya alam yang melimpah seharusnya memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada masyarakat, permasalahan dalam pembangunan antar daerah diakibatkan adanya sumber daya alam dan kondisi demografis yang berbeda di setiap daerah sehingga proses pembangunan di setiap daerah yang mengakibatkan ketimpangan, oleh karena itu peneliti tertarik mengambil riset yang menarik untuk dikaji, adapun judul penelitian ini yaitu **”Determinan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi sampai saat ini masih menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan untuk memenuhi pendapatan secara optimal. Menurut (Arsyad, 2014), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses naiknya pendapatan riil per kapita di suatu negara dalam jangka panjang dan adanya keterkaitan antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi untuk dianalisis secara nasional maupun regional. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi yang dapat dilihat melalui pencapaian nilai total Produk Domestik Bruto.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat mengakibatkan disparitas pendapatan karena tidak diikuti dengan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tidak

merata, maka akan menyebabkan disparitas pendapatan. Tingginya disparitas pendapatan akan memperlebar sekat pemisah antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain disparitas di Provinsi Jambi dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta masalah pembangunan antar daerah Kabupaten dan Kota yang tidak merata.

Penyebab dari disparitas pendapatan antar daerah yaitu perbedaan antara potensi daerah, kondisi demografis dan ketenagakerjaan serta kondisi sosial budaya. Akibatnya dalam mendorong proses pembangunan disuatu daerah menjadi berbeda dan menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi yang dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian di beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, sehingga terdapat daerah yang maju dan daerah yang terbelakang. Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Faktor-Faktor Apakah yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2022?
2. Bagaimana Perbedaan Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2022.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perbedaan Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya bagi para civitas ilmu ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mempertimbangkan kebijakan untuk menekan angka disparitas pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi